

**ANALISIS PENYELESAIAN AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
NOMOR: 120/KCSY02-APP/MSY/2011 MELALUI PENGADILAN AGAMA
MEDAN KELAS I-A (Studi Kasus Putusan Nomor: 944/Pdt.G/2015/PA-Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai salah satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah dan Hukum

Oleh :

Melyda Khoiriyah Pane
NIM. 24.15.3.089



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1441 H**

Analisis Penyelesaian Akad Pembiayaan Musyarakah
Nomor: 120/KCSY02-APP/MSY/2011 Melalui
Pengadilan Agama Medan Kelas I-A
(Studi Kasus Putusan Nomor: 944/Pdt.G/2015/PA-Mdn).

Oleh

Melyda Khoiriyah Pane
24.15.3. 089

Dapat Diajukan Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Muamalah

Medan, 11 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abd.Rahim. M.Hum
NIP: 195712301988031003

Dra.Sahliah, M.Ag
NIP:196304131998032001

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Tetty Marlina Tarigan, M,Kn
NIP:197701272007102002

SURAT PENGESAHAN

Skripsi ini yang berjudul “**Analisis Penyelesaian Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 120/Kcsy02-App/Msy/2011 Melalui Pengadilan Agama Medan Kelas I-A (Studi Kasus Putusan Nomor: 944/Pdt.G/2015/PA-Mdn)**”

Telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal :

11 Juni 2021 M

30 Syawal 1442 H

Skripsi telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Ketua

Sekretaris

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127007102002

Cahaya Permata. MH
NIP. 198612272015032002

Anggota Penguji

1. Dr. Abd. Rahim, M.Hum
NIP. 195712301988031003

2. Dra. Sahlia, M.Ag
NIP. 196304131998032001

3. Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 197505312007101001

4. Annisa sativa, M.Hum
NIP. 198407192009012010

Medan, Juli 2021
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN-SU Medan

Dr. H.Ardiansyah, Lc,M.Ag
NIP. 197602162002121002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melyda Khoiriyah Pane

Nim : 24.15.3. 089

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah

Judul Skripsi : Analisis penyelesaian akad pembiayaan musyarakah nomor:
120/KCSY02-APP/MSY/2011 melalui pengadilan agama
medan kelas I-A (studi kasus putusan nomor:
944/pdt.G/2015/PA-Mdn).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis penyelesaian akad pembiayaan musyarakah nomor: 120/KCSY02-APP/MSY/2011 melalui pengadilan agama medan kelas I-A (studi kasus putusan nomor: 944/pdt.G/2015/PA-Mdn).”** adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, Juli 2021
Yang Membuat Pernyataan

Melyda Khoiriyah Pane
24.15.3. 095

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: Analisis Penyelesaian Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 120/Kcsy02-App/Msy/2011 Melalui Pengadilan Agama Medan Kelas I-A (Studi Kasus Putusan Nomor: 944/Pdt.G/2015/Pa-Mdn). Dimana Ongku Sutan Harahap menjalin kerjasama dengan bank Sumut syariah dan dalam berjalannya waktu tersebut nasabah meninggal dunia dan mengakibatkan tertunggaknya cicilan, kemudian bank memberikan surat peringatan kepada ahli waris untuk membayarnya tapi ahli waris keberatan dengan peringatan tersebut dan membuat surat kepada pengadilan agama. Adapun Pengadilan Agama Medan telah memberikan Putusannya yang pada pokoknya Perjanjian Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 120/KCSY02-APP/MSY/2011 bertanggal 26 April 2011 batal demi hukum, menghukum PT. Bank Sumut Syariah Cabang Sidempuan untuk mengembalikan agunan tersebut, dan melepaskan ahli waris Alm. Ongku Sutan Harahap. Dalam penelitian ini dikemukakan inti permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah putusan 944/Pdt.G/2015/PA-Mdn majelis hakim Pengadilan Agama Medan terhadap penyelesaian sengketa akad musyarakah dan Apakah yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Medan dalam menyelesaikan sengketa Akad Pembiayaan Musyarakah pada Putusan Nomor: 944/Pdt.G/2015/PA-Mdn, serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian sengketa akad pembiayaan musyarakah pada putusan majelis hakim pengadilan agama Nomor: 944/Pdt.G/2015/PA-Mdn? Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data menggabungkan antara field research dan library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan legal normatif dan conceptual approach. Bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian didapati bahwasanya Bahwa Penyelesaian Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 120/KCSY2-APP/MSY/2011 bertanggal 26 April 2011 dalam ekonomi syariah harusnya mempertimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak sehingga menghindari kerugian sepihak sebagaimana tujuan ekonomi syariah adalah untuk berbagi hasil antara untung dan rugi dalam perjanjian akad pembiayaan musyarakah tersebut, Tentunya tidak adil jika dalam Putusan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn penggugat dibebaskan dari pengembalian modal *musyarakah* tersebut.

Kata kunci : Kerja sama, Akad Musyarakah, Pembiayaan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji hanya milik Allah yang telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar. Peneliti bersyukur kepada Allah dan memohon ampunan dari segala dosa dan semua amal. Salawat dan salam kepada Nabi dan hamba-Nya yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, keturunan dan juga semua orang yang mencintainya. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Penyelesaian Akad Pembiayaan Musyarakah nomor: 120/CSY02-APP/MSY/2011 melalui Pengadilan Agama Medan kelas I-A (studi kasus putusan nomor: 944/Pdt.g/2015/PA-Mdn).sebagai persyarakatan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak kesulitan dan hambatan, namun berkat taufik dan hidayah dan izinnya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan muamalah.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terutama dan teristimewa Ayah Khoirun Pane dan Ibu tercinta Nurmega Hutabarat yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik Peneliti sampai saat ini, memberikan dukungan cinta, kasih sayang dan doa sehingga

karya kecil ini peneliti jadikan sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Jika bukan karena ridho keduanya mungkin perjalanan pendidikan ini tak sampai pada masa gelar Sarjana. Dan Terima kasih juga kepada abang saya Zulfahri Pane dan kakak ipar saya Kartika Usman telah berjasa kepada peneliti selama proses kuliah dan yang telah membantu biaya kuliah peneliti sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini

2. Bapak rektor yaitu **Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A** selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor.
3. Bapak dekan yaitu **Dr. H. Ardiansyah, Lc. M.Ag** selaku pimpinan di Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum UIN-SU
4. Bunda **Tetty Marlina Tarigan, M.Kn** selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu **Cahaya Permata.M.Hum** selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
5. Bapak **Dr. Abd. Rahim, M.Hum** (Pembimbing I) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini, dan Ibu **Dra. Sahliah, M.Ag** (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti.
7. Begitu juga terimakasihku kepada saudara- saudara saya Hamdan supriyadi, Nuriani Hidayana Pane, Muhammad Idris Pane dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan.

8. Terimakasih kepada Nurhamidah Lubis, Lidia, Miskah Nasution, Fuzza Lestari dan terkhusus Siti Rohana, Saidatunnur, Rahmi Salamah, Yusteraeni, Leni Afrida, dan Rifani yang sudah setia menjadi sahabat terbaik saya selama dimedan dan yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang kuat bagi saya baik dalam informasi maupun dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga Besar Muamalah C stambuk 2015 Khusus Nindi Aulianti, Mahmulia Nasution, Ramadhan Syahputra Nasution dan Roni Pranata

Akhirnya pada Allah SWT jualah peneliti berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti serta bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, Juli 2021

Penulis

Melyda Khoiriyah Pane
24.15.3.0.89

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH.....	26
1. Pengertian Musyarakah.....	26
2. Dasar Hukum Musyarakah.....	28
3. Rukun dan Syarat Musyarakah.....	30
4. Bentuk-bentuk Akad Musyarakah.....	31

5. Hikmah Musyarakah	35
6. Ketentuan akad musyarakah.....	35
7. Berakhirnya akad musyarakah.....	37
8. Skema Akad Musyarakah di Bank Syariah.....	40
B. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama	42
1. Ekonomi syariah.....	42
2. Dasar hukum pengadilan agama.....	44
3. Kedudukan dan kewenangan pengadilan agama.....	45
BAB III ULASAN PUTUSAN NO: 944/PDT.G/2015 /PA.Mdn.....	51
A. Ulasan Umum Pengadilan Agama Medan.....	51
B. Deskripsi Perkara Nomor 944/Pdt.G/2012/PA.Mdn Tentang Akad Pembiayaan Musyarakah.....	56
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Putusan Majelis hakim Nomor: 944/Pdt.G/2015/PA-Mdn terhadap pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah	66
B. Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Medan dalam menyelesaikan sengketa Akad Pembiayaan Musyarakah pada Putusana Nomor: 944/Pdt.G/2015/PA-Mdn.....	68
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah Yang Dilakukan Antara Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan	81
D. Analisis Penulis.....	96
BAB V PENUTUP.....	99

A. Kesimpulan.....99

B. Saran.....101

DAFTAR PUSTAKA..... 102

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, tentunya memberikan arti tersendiri bagi masyarakatnya, dimana segala sesuatunya itu harus dijalankan sesuai dengan hukum yang ada. Seperti halnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa dalam masyarakat. Indonesia telah membentuk suatu instansi yang ditugaskan dan berkewenangan untuk memeriksa dan mengadili setiap permasalahan maupun sengketa tersebut. karena setiap perbuatan akan menimbulkan suatu konsekuensi tertentu yang mana untuk memberikan tanggungjawab kepada pihak dirugikan atas perbuatan tersebut.

Instansi tersebut dibentuk semata-mata hanya untuk menunjukkan adanya ikut campur pemerintah dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, atau sebagai jaminan untuk mempertahankan hak yang dirugikan karena suatu perbuatan. Seperti halnya instansi Peradilan Agama dimana lahir karena adanya Undang-undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dimana dalam Pasal 1 angka 1 yaitu “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam” sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut telah menunjukkan bahwa adanya sitem Peradilan yang dibentuk secara khusus untuk memeriksa dan mengadili permasalahan anatar orang islam.¹

¹ Amran Suadi, *Penyelesain Sengketa Ekonomi Syariah : Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.125

Peradilan Agama berkedudukan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam, yang mana mengenai perkara perdata yang diatur undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan adanya batasan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bagi orang islam. Perkara-perkara perdata tersebut telah diatur secara khusus menjadi kewenangan peradilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya, yang mana tertuang dalam Pasal 49 yaitu: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:²

- a. perkawinan
- b. waris
- c. wasiat
- d. hibah
- e. wakaf
- f. zakat
- g. infaq
- h. Shadaqah
- i. ekonomi syari'ah

Terkhusus pada perkara ekonomi syari'ah, ini adalah hal yang masih baru bagi Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkaranya, yaitu sejak adanya perubahan pertama Undang-undang tentang Peradilan Agama. Perkara ekonomi syari'ah menjadi kewenangan peradilan agama karena dasar dari perikatannya berdasarkan hukum islam, dan dimana penggunaan ekonomi

² Ibid, h.132

syaria'ah tidak terlepas dari perkembangan sistem perbankan yang membuka kerjasama dengan nasabah dengan memakai hukum islam. karena melihat perkembangan yang ada ekonomi islam sudah tidak asing lagi dalam perkembangan ekonomi dunia.

Ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan yang mempunyai prinsip syariah dalam mengikat suatu perjanjian/ akad antara 2 (dua) orang atau lebih untuk kepentingan bekerja sama dengan tujuan mendapatkan keuntungan karena Allah. Karena dalam ekonomi syariah, selain mendapatkan keuntungan berupa materi juga mendapat keridhoan Allah karena kerja sama tersebut didasari karena hukum islam yang bersumber dari al-quran dan sunnah. Para ekonom barat pun mulai mengakui eksistensi ekonomi Islam sebagai suatu Ilmu ekonomi yang memberi warna berbeda dalam perkembangan ekonomi di dunia, dimana ekonomi Islam dapat menjadi sistem ekonomi alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat, disamping sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan umat.³

Ekonomi syariah pada dasarnya memberikan kemudahan kepada pihak dalam menjalankan kerja sama yang disepakati, agar hak dan kewajiban keduanya terpenuhi, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتْهُ فَاَسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

³M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 6

“Artinya: Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zhalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zhalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. (QS Shad, 38:24)”

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan akad syirkah dan selama akad berlangsung tidak boleh zalim sesama mereka dan dalam ekonomi syariah telah mendorong minat masyarakat dalam melakukan kerja sama antara pihak-pihak dalam akad.

Akad adalah cara yang diridhoi Allah dan harus di tegakkan isinya, karena dalam menjalankan akad setiap pihak akan menerima keuntungan sesuai bagian masing-masing, dimana keuntungan tersebut di peroleh dengan syariat islam.⁴ Sesuai dengan bunyi hadist

يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا

“Tangan Allah berada pada dua orang yang bersyarikat selama tidak berkhianat”⁵

Hadis ini menjelaskan bahwa Allah akan menjaga dan membantu mereka yang bersyarikat dengan memberikan tambahan pada harta mereka dan melimpahkan berkah pada perdagangan mereka. Jika ada yang berkhianat, maka berkah dan bantuan tersebut dicabut Allah.

Dan dalam rumusan akad di atas mengidentifikasi bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri

⁴ T.M. Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 8

⁵ Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni* (Beirut: Darul Fikri, Vol 5), h. 1

satu sama lain akad ini akan terwujud apabila didalamnya ada ijab dan kabul. kedua sesuai dengan kehendak syariat, ketiga adanya akibat hukum pada objek perikatan.⁶

Dan didalam lembaga-lembaga keuangan syariah yang mendasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) juga harus menjalankannya sesuai dengan perjanjian - perjanjian yang telah disepakati. Dengan adanya bank-bank syariah ataupun bank-bank konvensional dalam usaha perbankan yang dijalankannya seperti Bank Sumut Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan lain-lainnya.⁷ Semua harus berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Undang-Undang tersebut diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dioperasikan dan di implementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi syariah.

Salah satunya adalah Bank Sumut yang mengkonversi diri sebagai PT. Bank Sumut Syariah yang bertujuan untuk menarik masyarakat agar bekerjasama dengan PT. Bank Sumut Syariah dalam menunjang ekonomi masyarakat. Dalam ekonomi syariah/ perbankan syariah itu ada beberapa jenis akad yaitu *Akad Murabahah, Akad Wadiah, Akad Istishna, Akad Hawalah, Akad Musyarakah, Akad Salam, Akad Qardh, Akad Ijarah, Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik, dan Akad Musyarakah Mutanaqisah.*

⁷ Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Makalah Orasi Ilmiah disampaikan pada pembukaan Kuliah Fakultas Syariah IAIN Antasari) Banjarmasin, 30 Agustus 2010, h. 3

Adapun akad secara khusus telah di jelaskan dalam Al-quran sebagaimana firman Allah Surah Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: *“Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu (Q.S al-Maaidah (5) ayat 1)”*

Dari tafsir ayat tersebut dijelaskan ini adalah perintah dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, untuk memenuhi perjanjian yang merupakan konsekuensi dari keimanan memenuhi perjanjian, maksudnya menyempurnakan, melengkapi, tidak mengurangi atau membatalkannya, Ini meliputi perjanjian antara hamba dan Rabbnya, menunaikannya dengan sebaik-baiknya dan tidak mengurangi hak-haknya sedikitpun, juga perjanjian seorang hamba dengan Rasulullah yaitu dengan mentaati dan mengikutinya, dan perjanjian dengan manusia dalam bentuk transaksi-transaksi muamalah seperti akad-akad dalam perbankan syariah mengikat masyarakat untuk menjalin kerja sama dengan prinsip bagi hasil sebagaimana prinsip ekonomi syariah.

Salah satu kasus pembiayaan syariah yang berujung sengketa karena tidak sesuai dengan akad yang disepakati adalah PT. Bank Sumut Syariah dalam hal ini menjalin kerja sama dengan Bapak Ongku Sutan Harahap (Nasabah tetap PT. Bank Sumut Syariah) dengan mengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah. Sebagaimana Perjanjian Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 120/KCSY02-APP/MSY/2011 bertanggal 26 April 2011. Dimana Akad Pembiayaan Musyarakah adalah usaha bank dengan nasabah

pemilik modal untuk menyertakan modalnya bersama atas suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dalam pengelolaan manajemen proyek tersebut.⁸

Adapun Akad Pembiayaan Musyarakah tersebut dibuat pada tanggal 26 April 2011 dengan jumlah Akad Pembiayaan Musyarakah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dalam akad tersebut telah menyerahkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor. 457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua tanggal 07 Juni 2007 atas nama Ongku Sutan Harahap sebagai agunan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah tersebut. Pada saat Pembuatan dan Penanda tangan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 120/KCSY02-APP/MSY/2011 bertanggal 26 April 2011 oleh PT. Bank Sumut Syariah dan PT. Bank Sumut memerintahkan nasabah yaitu Ongku Sutan Harahap untuk membayar biaya Administrasi, Notaris, Asuransi Jiwa, dan Asuransi Kebakaran, atas seluruh biaya tersebut telah Ongku Sutan Harahap lunasi yang berjumlah Rp. 13.609.408,- (tiga belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah empat ratus delapan rupiah). Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 120/KCSY02-APP/MSY/2011 bertanggal 26 April 2011.

Bahwa pada saat berjalannya kerja sama Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 120/KCSY02-APP/MSY/2011 bertanggal 26 April 2011

⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2016, h. 145

salah satu pihaknya meninggal dunia yaitu saudara Ongku Sutan Harahap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011, sehingga menyebabkan terhentinya/tertunggaknya Akad Pembiayaan Musyarakah Saudara Ongku Sutan Harahap dengan PT. Bank Sumut Syariah. Dengan adanya berita kemalangan tersebut pihak PT Bank Sumut Syariah dan PT. Bank Sumut telah mengirimkan Surat Peringatan kepada ahli waris Alm. Ongku Sutan Harahap yang pada pokoknya menegaskan untuk membayar tunggakan pembiayaan Alm. Ongku Sutan Harahap sehingga jika tidak dipenuhi maka agunan berupa Setifikat Hak Milik yang telah diserahkan kepada PT Bank Sumut Syariah dan PT. Bank Sumut akan segera diajukan lelang kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Medan. Akan tetapi ahli waris dari Alm. Ongku Sutan Harahap merasa sangat keberatan atas Surat Peringatan yang di kirimkan PT Bank Sumut Syariah dan PT. Bank Sumut. Hal ini karena telah bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah, dimana seharusnya ketika salah satu pihak dalam Akad Pembiayaan Musyarakah meninggal dunia, maka Akad Pembiayaan Musyarakah tersebut telah batal secara hukum islam maupun syariah. Sebagaimana prinsip asas ekonomi syariah sehingga ahli waris Alm. Ongku Sutan Harahap membawa Permasalahan ini ke Meja Pengadilan Agama, sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 dari Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 120/KCSY02-APP/MSY/2011 bertanggal 26 April 2011 yang disebutkan *“Bila terjadi sengketa perselisihan maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Agama di Medan”*.

Adapun Pengadilan Agama Medan telah memberikan Putusannya yang pada pokoknya Perjanjian Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 120/KCSY02-APP/MSY/2011 bertanggal 26 April 2011 batal demi hukum, menghukum PT. Bank Sumut Syariah Cabang Sidempuan untuk mengembalikan agunan tersebut, dan melepaskan ahli waris Alm. Ongku Sutan Harahap dari kerugian Akad Pembiayaan Musyarakah tersebut sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan telah memberikan Putusannya yang pada pokoknya Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan. Sehingga perkara ini dilanjutkan pada tingkat Mahkamah Agung dan telah menerima Putusana daln telah di Putus Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada pokoknya memberikan putusan sendiri yang berbeda dari Pengadilan Agama Medan Pengadilan Agama Tinggi Meda. Karena isi Putusan Mahkamah Agung sendiri membebaskan seluruh kerugian yang terjadi akibat Akad Pembiayaan Musyarakah ditanggung kedua belah pihak sesuai dengan proporsi masing-masing yang disebutkan dalam perjanjian Akad tersebut.

Melihat hal tersebut di atas, menarik perhatian untuk melihat apa yang menjadi dasar setiap pertimbangan hukum majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 120/KCSY02-APP/MSY/2011 bertanggal 26 April 2011. Sehingga Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih judul skripsi tentang **ANALISIS PENYELESAIAN AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH NOMOR: 120/KCSY02-APP/MSY/2011 MELALUI PENGADILAN AGAMA**

MEDAN KELAS I-A (Studi Kasus Putusan Nomor: 944/Pdt.G/2015/PA-Mdn)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah putusan 944/Pdt.G/2015/PA-Mdn majelis hakim Pengadilan Agama Medan terhadap penyelesaian sengketa akad musyarakah?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Medan dalam menyelesaikan sengketa Akad Pembiayaan Musyarakah pada Putusana Nomor: 944/Pdt.G/2015/PA-Mdn,
3. Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian sengketa akad pembiayaan musyarakah pada putusan majelis hakim pengadilan agama Nomor: 944/Pdt.G/2015/PA-Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah putusan 944/Pdt.G/2015/PA-Mdn majelis hakim Pengadilan Agama Medan terhadap penyelesaian sengketa akad musyarakah
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam menyelesaikan sengketa Akad Pembiayaan Musyarakah pada Putusana Nomor: 944/Pdt.G/2015/PA-Mdn,
3. Untuk mengatuhui bagaimanakah analisis tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian akad pembiayaan musyarakah pada Putusana Nomor: 944/Pdt.G/2015/PA-Mdn

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan muamalah tentang pengaturan terhadap pertimbangan hukum dalam penyelesaian perkara akad pembiayaan musyarakah khususnya dalam pengadilan agama dan untuk menambahkan pengetahuan kepada pembaca pada umumnya dan menambah ilmu pengetahuan kepada penulis khususnya.

2. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan hukum terhadap masyarakat dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran baru bagi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan informasi yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama khususnya dalam kasus terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam penyelesaian perkara akad pembiayaan musyarakah

E. Kajian Pustaka

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui analisis guna pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti juga melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian yang lebih dahulu ditulis baik berupa skripsi maupun tesis yang masih ada hubungan dan relevansinya dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Pertama, Permasalahan mengenai putusan hakim mengenai sengketa ekonomi syariah antara lain yaitu skripsi karya Pratami Wahyudya Ningsih (www.dgilib.uns.ac.id., diakses pada 7 Agustus 2016) “ *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan al-Musyarakah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Terhadap Putusan Nomor: 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg)*, skripsi termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan dari hasil penelitiannya adalah dasar pertimbangan yang digunakan hakim yang tertuang dalam putusan nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg tersebut diantaranya adalah tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sengketa diputus dengan *verstek*, Tergugat telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi sesuai dengan ketentuan hukum positif dan dalil-dalil syar’i sehingga tergugat menjadi pihak yang kalah. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian karya Pratami Wahyudya Ningsih di atas adalah terdapat perbedaan yang jelas dalam penelitian yang akan penulis lakukan, selain dari tempat yang dijadikan lokasi penelitian, perbedaan juga terdapat pada pokok permasalahan. Pada skripsi Pratami Wahyudya Ningsih membahas tentang pemenuhan kewajiban akad pembiayaan *al-Musyarakah*.⁹ Sedangkan dalam skripsi yang penulis susun membahas tentang penyelesaian sengketa akad musyarakah pada putusan pengadilan agama medan nomor: 944/Pdt.G/2015/PA-Mdn pada persamaannya adalah sama-sama membahas tentang akad musyarakah

⁹ Pratami Wahyudya, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan al-Musyarakah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Terhadap Putusan Nomor: 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg)*, skripsi (Semarang. UNS, 2016), h.54

Kedua, Skripsi Ahmad Rasyid Ridho, NPM. 54153045, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul “*Penerapan Akad Musyarakah Pada Produk Penyaluran Dana di PT. Bank Mega Syariah Medan*”.

Skripsi ini merupakan penelitian Empiris dengan menguraikan tentang pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah Pada PT. Bank Mega Syariah dan faktor faktor yang mempengaruhi minimnya penggunaan pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Mega Syariah, Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian karya Ahmad Rasyid Ridho di atas adalah penelitian penulis yang dianalisa adalah tentang penerapan akad musyarakah pada prosuk penyaluran dana di PT. Bank Mega Syariah Medan, sedangkan penulis menganalisis tentang bagaimana perjanjian dalam akad musyarakah dengan Bank Sumut, sedangkan pada karya tulis Ahmad Rasyid Ridho tidak menganalisis putusan pengadilan

Kemudian skripsi yang ditulis Mohammad Irham Maulana tahun 2018 yang berjudul *Analisis Hukum Yuridis Terhadap Putusan Nomor 882/PDT.G/2010/PA.Sit*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis terhadap implementasi perjanjian pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah perkara No.882Pdt.G/2010/PA.Sit dan keputusan hakim menolak gugatan ganti rugi immateriil pada putusan perkara dalam akad musyarakah Pengadilan Agama Situbondo. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Lalu dianalisis dengan mengemukakan teori umum ditinjau dari hukum yuridis. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan

bahwa dalam perjanjian pembiayaan pada perkara No.882/Pdt/G/2010/PA.Sit, akad yang tertulis dalam perjanjiannya adalah akad musyarakah. Namun dalam perjanjian tidak disebutkan secara jelas jenis musyarakah apa yang akan diimplementasikan kedalam pembiayaan tersebut dan dalam mempertimbangkan Majelis tidak melihat Pasal 1246 KUHPdata sebagai dasar pertimbangannya.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian karya adalah dalam penelitian ini penulis ingin menganalisa putusan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn. dengan analisa hukum islam dari aspek perjanjian akad pembiayaan musyarakah dan akibat hukumnya dalam perjanjian tersebut sedangkan karya Mohammad Irham Maulana putusan tersebut dianalisa dengan analisis yuridis.¹⁰

F. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Musyarakah

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah*. *Musyarakah* menurut bahasa berarti “*al-ikhtilath*” yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan. Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi *syirkah* antara lain:

¹⁰ Mohammad Irfan Maulana, *Analisis hukum yuridis terhadap putusan perkara no. 882/pdt.G/2010 PA Situbondo tentang Wanprestasi dalam Akad Musyarakah*, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013)

- 1) Menurut Mazhab Syafi'i, *syirkah* merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan¹¹
- 2) Menurut Sayyid Sabiq, bahwa *syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.
- 3) Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *syirkah* merupakan akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.
- 4) Menurut Wahbah Zuhaili *syirkah* adalah:

الشركة لغة : هي الاختلاط أى خلط أحد المالكين بالآخر بحيث لا يمتازان عن بعضهما

*Syirkah adalah bercampurnya suatu harta dengan harta lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.*¹²

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹³

Menurut Fatwa MUI, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

¹¹ Mas'adi Ghufon A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.191

¹² Wahbah A- Zuhaili, *Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 5 cet, Ke-10, hal .3875.

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 218

Secara teknis musyarakah adalah akad kerjasama antara 2 (dua) pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana-mana masing pihak memberikan konstribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Di dalam musyarakah setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad kerugian modal di bagi berdasarkan persentase modal masing - masing.¹⁴

Berdasarkan pengertian musyarakah diatas dapat diambil kesimpulan musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama - sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

2. Dasar hukum Musyarakah

a. Landasan Al-Qur'an

Adapun beberapa yang menjadi dasar hukum musyarakah antara lain Dalam Al-Qur'an surah Shaad: 24 sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

¹⁴ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2014),h. 79

Artinya : “Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan Amat sedikitlah mereka ini” dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Kemudia Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 12 sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَالْهَنْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya :Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Dalam surat An-Nisa (4) ayat 12, pengertian *syuraka* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surat Shad (38) ayat 24, lafal *al-khutha* diartikan *syuraka*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

b. Landasan Dalam Hadis Rasulullah SAW

Adapun hadis yang menjadi dasar hukum masyarakat dinyatakan sebagai berikut:

Hadis Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِיקَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا . رواه أبو داود وصححه الحاكم

Artinya : Dari Abu Hurairah, r.a. beliau berkata: *Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka. Riwayat Abu Dawud. Hadis Sahih menurut Hakim¹⁵”*

Kaidah Ushul Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dari muamalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”¹⁶

Dari beberapa hadis dan kaidah tersebut jelaslah bahwa *musyarakah* merupakan akad yang dibolehkan oleh *syara*, bahkan dalam hadis yang kedua dijelaskan bahwa *musyarakah* merupakan akad yang sudah dilaksanakan

¹⁵ Ibnu Hajar al asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah: Asep M, (Jakarta: PT Elex Media Kompuindo, 2012), h. 365

¹⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 130.

sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, kemudian akad tersebut diterapkan sebagai akad yang berlaku dan dibolehkan dalam Islam.

3. Rukun dan Syarat

Rukun musyarakah adalah sesuatu yang harus ada ketika musyarakah itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun musyarakah menurut ulama Hanafi, bahwa rukun musyarakah ada dua, yakni ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) menentukan adanya musyarakah. Adapun rukun musyarakah yang lainnya sebagai berikut :

- a. pelaku akad yaitu para mitra usaha
- b. objek akad yaitu modal, kerja, keuntungan, ijab dan qabul.

Sementara syarat musyarakah merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi musyarakah batal. Menurut Hanafiah syarat-syarat musyarakah terbagi menjadi empat bagian itu yang menjadi syarat akad pembiayaan musyarakah dalam bank islam ada 3 (tiga) yaitu :

- 1) Pembiayaan Pembiayaan suatu proyek investasi yang telah disetujui dilakukan bersama-sama dengan mitra usaha yang lain, sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan
- 2) Semua pihak termasuk bank Islam, berhak ikut serta dalam manajemen proyek tersebut
- 3) Semua pihak secara bersama-sama menentukan porsi keuntungan yang akan diperoleh. Pembagian keuntungan ini tidak harus

sebanding dengan penyertaan modal masing- masing dan bila proyek ternyata mengalami kerugian, maka semua pihak ikut menanggung kerugian itu sebanding dengan penyertaan modalnya.¹⁷

4. Berakhirnya/Batalnya akad Musyarakah

Faktor-faktor yang membatalkan semua jenis musyarakah adalah menurut ulama Malikiyah apabila salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab musyarakah merupakan akad yang terjadi atas dasar rela sama rela antara kedua belah pihak, atau salah satu pihak kehilangan kemampuan untuk mengelola hartanya baik karena gila maupun karena alasan lainnya dan apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan bubar karena musyarakah berawal dari kesepakatan untuk bekerja sama dan setiap mitra mewakili mitra lainnya dalam kegiatan operasional. Dengan tidak ada lagi salah seorang mitra maka berarti hubungan perwakilan juga dianggap sudah tidak ada.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan, Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang memaparkan obyek yang diteliti dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹⁷ Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan di atas. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang dilakukan adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan¹⁹ yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : Nomor: 624 K/AG/2017. Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut, penulis melakukannya dengan cara meneliti peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, surat-surat edaran maupun yurisprudensi, majalah-majalah hukum, teori-teori hukum dan pendapat - pendapat para sarjana hukum terkemuka yang merupakan data sekunder, kemudian dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu tentang ekonomi syari'ah (akad musyarakah).

Digunakan juga bahan-bahan hukum yang berupa sumber hukum dalam arti formil (peraturan perundang-undangan) dan studi kepustakaan, pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh peraturan-peraturan yang berlaku tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri dikaitkan dengan asas sistem pendaftaran pertama

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, (Bandung: Alumni, 1985), h. 45

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.35

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Jenis data penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari rujukan atau sumber pertama, bahan hukum berupa peraturan-peraturan mengenai ekonomi syari'ah.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti seperti buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), jurnal ilmiah dan berbagai literatur pendukung lainnya yang berhubungan dengan rumusan permasalahan.²⁰
- 3) Bahan hukum tersier, yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum .

a. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, jurnal, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan lisensi.

Oleh karena itu, studi dokumen biasanya diistilahkan dengan studi kepustakaan, karena mengkaji berbagai dokumen kepustakaan lebih lanjut

²⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 85.

dalam pelaksanaan studi kepustakaan, langkah-langkah yang ditempuh peneliti adalah:²¹

- a. Mengidentifikasi sumber bahan hukum di mana bahan tersebut akan diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya;
- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut;
- c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus pula dengan pemberian tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan aturan perolehannya;
- d. Menganalisis berbagai bahan hukum yang diperoleh itu sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian

4. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

Teknik analisis terhadap bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini adalah teknik deskripsi, interpretasi, sistematisasi, argumentasi, dan evaluasi.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 82.

5. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada buku pedoman metode penelitian dan karya ilmiah yang diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2017

H. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, dibagi menjadi lima bab. Adapun tujuan pembagian skripsi ini kedalam bab dan sub bab adalah untuk menjelaskan setiap permasalahan dengan baik.

BAB I: pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori, pengertian *musyarakah* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat *musyarakah*, bentuk akad-akad *musyarakah*, berakhirnya akad *musyarakah*. Hikmah *musyarakah*, Skema Akad *Musyarakah* di Bank Syariah dan sejarah Ekonomi Syariah serta pemberlakuannya di Indonesia

BAB III: Bab ini merupakan tinjauan umum tentang letak Geografis dan Demografis Gambaran Pengadilan Agama Medan serta tentang Kasus Posisi dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 944/Pdt.G/2015/PA-Mdn

BAB IV: Pembahasan, mengenai Pengaturan hukum/dasar setiap majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara akad pembiayaan *Musyarakah* pada Putusan Nomor: 944/Pdt.G/2015/PA-Mdn dan penyelesaian sengketa pada ekonomi syariah menurut hukum Islam dan peraturan di Indonesia

BAB V : Penutup Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah, sedangkan saran adalah kritik dan masukan penulis dari pembahasan yang telah dipaparka

BAB II

LANDASAN TEORI

Sebelum penulis membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah terlebih dahulu diuraikan tentang konsep akad pembayaran Musyarakah

A. Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Secara bahasa *syirkah* berasal dari bahasa arab, yaitu

شَرِكٌ - يَشْرِكُ - شَرِكًا - شَرَكُهُ - شَرَكُهُ

Kata musyarakah berasal dari isim masdar dan fiil sulasi mazid, yang berarti ikhtilat (percampuran).²² Menurut etimologi musharakah adalah sharkah, sharikah yang berarti perserikatan.²³ Secara terminologi shirkah atau musharakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan risiko ditanggung bersama.²⁴

Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat di pisahkan satu sama lain. Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan Syariah.

²² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), h.119

²³ Adib Bisri, *al-Bisri Kamus Indonesia- Arab Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), h.373

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h.129

Sedangkan Menurut Syafiiyah

. وَفِي الشَّرْعِ : عِبَارَةٌ عَنْ ثُبُوتِ الْحَقِّ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِشَخْصَيْنِ فَصَاعِدًا عَلَى جِهَةِ الشُّبُوحِ

*Syirkah menurut istilah syara' merupakan suatu ungkapan mengenai tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.*²⁵

Definisi ini substansinya menegaskan bahwa syirkah itu adalah akad atau perikatan perserikatan, yang memiliki akibat hukum adanya hak yang sama kepada kedua belah pihak atau lebih, baik dalam hal perserikatan harta kekayaan maupun perserikatan pekerja atau dikeduanya.

Menurut Hanafiyah

الشَّرْكَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَاكِكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

*“Syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.”*²⁶

Defenisi-defenisi yang lain tidak mengarah kepada substansi syirkah tetapi lebih kepada implikasi syirkah itu sendiri. Hal itu terlihat dari kata kunci yang mereka gunakan dalam mendefinisikan syirkah, yaitu kata hak dan wewenang.

Menurut Hanabilah

²⁵ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), cet. Ke-2, h. 153

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa adillatuhu*, Jus III, (Bairut: Darul al Fikr, 2003), h. 793

الشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف

Syirkah adalah merupakan perhimpunan hak-hak atau pengolahan (harta kekayaan).

Menurut definisi ini, syirkah lebih berkonotasi merupakan badan usaha yang dikelola oleh banyak orang, setiap orang memiliki hak-hak tertentu sesuai peran dan fungsinya dalam mengolah dan mengelola harta yang dimiliki badan usaha itu.²⁷

Menurut Malikiyah

الشركة هي إذن في التصرف لهما مع أنفسهما أي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن ينصرف في مال لهما مع إبقاء حق التصرف لكل منهما

Syirkah merupakan ijin untuk melakukan pembelanjaan harta (tasaruf) bagi keduanya peserta yang manfaatnya kembali pada diri mereka sendiri; yang dikehendaki yaitu, setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasaruf terhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta.²⁸

Definisi yang dikemukakan ulama al-Malikiyah ini, lebih menitik beratkan pada perserikatan kepemilikan harta kekayaan (syirkah al-amwal) yang dimiliki dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak memiliki hak yang sama dalam hal melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut atas seizin pihak lain.

²⁷ Ibid h.341

²⁸ Ibid h.441

Dari berbagai pendapat fukaha di atas bahwa syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha di mana keduanya sama-sama memasukkan modal dalam usaha tersebut kemudian, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dan kerugian di tanggung bersama-sama pula.²⁹

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.³⁰

Dalam fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 musyarakah ialah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing.³¹

²⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan Implementasi pada sektor keuangan syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.191-192

³⁰ *ibid*, h.218.

³¹ fatwa DSN Noomor 08/DSN-MUI/IV/2000

Dalam perbankan pembiayaan sebagian modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*Sahibul mal*) dengan pengelola usaha (*musharik*). Pada akhir waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.³²

Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha secara perorangan atau menggabungkan modal dalam bentuk perkongsian (*syirkah*) dalam berbagai bentuk usaha. Betapa banyak proyek dan perusahaan tidak dapat ditangani sendiri. Untuk itu, membutuhkan banyak modal, tenaga, dan keterampilan. Dengan menggabungkan berbagai kekuatan tersebut, memungkinkan usaha dapat berjalan lancar. Akad musyarakah atau *syirkah* merupakan akad yang di perbolehkan dalam Al-Quran, hadist dan ijtimia para ulama juga sepakat untuk memperbolehkan akad musyarakah.

³² Abdul Ghofur, *Pengantar ekonomi syariah konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah*, (Depok: Rajawalipers, 2017), h.141.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Penyelesaian Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 120/KCSY2-APP/MSY/2011 bertanggal 26 April 2011 dalam ekonomi syariah harusnya mempertimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak sehingga menghindari kerugian sepihak sebagaimana tujuan ekonomi syariah adalah untuk berbagi hasil antara untung dan rugi dalam perjanjian akad pembiayaan musyarakah tersebut, Tentunya tidak adil jika dalam Putusan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn penggugat dibebaskan dari pengembalian modal *musyarakah* tersebut.
2. Bentuk akad musyarakah yang dilakukan oleh Alm. Ongku Sutan Harahap dan Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun dari perjanjian tersebut sah dan Sesuai dengan KHES.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berpendapat bahwa dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 120/KCSY2-APP/MSY/2011 bertanggal 26 April 2011 harus dibatalakan demi hukum karena, dalam perjanjian akad tersebut ada terdapat kelalaian pihak Bank dalam menyepakati Akad Pembiayaan Musyarakah tersebut. Sehingga berdasarkan kelalaian Pihak Bank Sumut Syariah tersebut, tentunya telah

memberikan petunjuk tidak dapatnya dilanjutkan akad pembiayaan dan pihak Bank Sumut Syariah diharuskan untuk mengembalikan dua agunan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah tersebut.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan adalah :

1. Sebaiknya dalam menjalin sebuah perikatan/ akad harus lebih memperhatikan kepentingan-kepentingan kedua belah pihak yang bersepakat, sebagai badan hukum PT. Bank Sumut Syariah harusnya lebih memperhatikan dan memastikan segala syarat-syarat dalam akad telah terpenuhi dengan baik, sehingga pemberian uang dapat dilakukan kepada nasabah.
2. Seharusnya Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 120/KCSY2-APP/MSY/2011 bertanggal 26 April 2011 antara PT. Bank Sumut Syariah dengan Alm. Ongku Sutan Harahap telah tertera setiap peraturan-peraturan yang mengikat antara kedua belah pihak ketika terjadi sesuatu, sehingga tidak perlu adanya penyelesaian sampai Mahkamah Agung.
3. Hakim Pengadilan Agama Medan seharusnya lebih memperhatikan setiap tindakan pada para pihak dalam akad pembiayaan musyarakah tersebut, karena menurut fakta yang ada pada Putusan terdapat kelalaian para pihak, sehingga untuk itu hakim seharusnya menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan hukum islam

dalam menyelesaikan akad musyarakah yang ada, yaitu dengan memperhatikan baik modal maupun pengeluaran para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonsia*, Makalah Orasi Ilmiah disampaikan pada pembukaan Kuliah Fakultas Syariah IAIN Antasari, Banjarmasin, 30 Agustus 2010
- Abiq, Sayyid , *Fiqh al-sunnah*, Beirut:Dar al-Fikr, 2006
- Afandi,Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009
- Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Prakti*. Jakarta: Gema Insani,2001
- Aripin, Zaenal, *130 Tahun Peradilan Agama Dari Serambi Mesjid ke Serambi Dunia*, Dirjen Badilag Mahkamah Agung R.I., Jakarta, 2012
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Rajawali Pers. Jakarta, 2007
- Ash-Shidiqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Asikin, Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2016
- Bisri,Adib, *al-Bisri Kamus Indonesia- Arab Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1996
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013

- Fathurrahman, Djmal, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrul Zaman*, Bandung: Cipta Adiya Bhakti, 2001
- Ghofur, Abdul, *Pengantar ekonomi syariah konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah*, Depok: Rajawalipers, 2017
- Ghufron, Mas'adi A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Hajar al asqalani, Ibn, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah: Asep M, (Jakarta: PT Elex Media Kompuindo, 2012
- Husaini, Waqar Ahmed, *Sistem Pembiayaan Masyarakat Islam*, Bandung: Pustaka–Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung, 1980
- Ifham Sholihin Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* ,Jakarta: PT Gramedia, 2019
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kharisma Putra utama, 2002
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- Maulana Irham, Mohammad, “*Analisis Hukum yuridis terhadap Putusan Perkara No. 882/Pdt.G/2010 PA Situbondo tentang Wanprestasi dalam Akad Musyarakah*”, Skripsi Surabaya:
- Muhammad ath-Thayyar, Abdullah Bin,et al, *Ensiklopedia Muamalah, Maktabah al- Hanif*, Yogyakarta. 2009

- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2014
- Muslich wardi, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bumi aksara, 2015
- Pratami Wahyudya, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan al-Musyarakah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Terhadap Putusan Nomor: 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg)*, skripsi, semarang. UNS, 2016
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni* (Beirut: Darul Fikri, Vol 5)
- Rianto, Nur Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan Implementasi pada sektor keuangan syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Soekanto, Soerjono, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, Bandung: Alumni, 1985
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 5 cet, Ke-10,

B. Undang - Undang

Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
musyarakah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa DSN-MUI Nomor. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudharabah
musyarakah

Pasal 49 ayat (1), Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006

Salinan	Putusan	Pengadilan	Agama	Medan
Nomor :944/P.dt.G/2015/PA.Mdn				

